

MEMBANGUN BUDAYA CEK FAKTA UNTUK MENANGKAL MISINFORMASI DI ERA DIGITAL

Teguh Yudi Cahyono¹, N.K. Etik Suparmini²

¹Universitas Negeri Malang

²Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: etik.suparmini@undiksha.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi secara signifikan. Seiring perubahan tersebut, misinformasi dan hoaks menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menimbulkan ancaman serius terhadap kohesi sosial, stabilitas politik, dan kepercayaan publik. Artikel ini mengkaji pentingnya membangun budaya cek fakta sebagai respons strategis terhadap tantangan misinformasi di era digital. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme dan praktik jurnalisme cek fakta di media daring Indonesia, peran literasi digital, serta bagaimana perpustakaan dapat berfungsi sebagai institusi pendukung verifikasi informasi. Temuan menunjukkan bahwa budaya cek fakta harus ditumbuhkan melalui upaya kolaboratif antara organisasi media, institusi pendidikan, perpustakaan, dan masyarakat. Perpustakaan, khususnya, memiliki peran strategis dalam mempromosikan literasi informasi dan memberdayakan masyarakat untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat ekosistem cek fakta di Indonesia.

Kata kunci: cek fakta; misinformasi; literasi digital; hoaks; perpustakaan

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly transformed the way information is produced, distributed, and consumed. Alongside these changes, misinformation and hoaxes have spread at an unprecedented pace, posing serious threats to social cohesion, political stability, and public trust. This article examines the importance of building a fact-checking culture as a strategic response to the challenge of misinformation in the digital era. Drawing on a literature review approach, this study explores the mechanisms and practices of fact-checking journalism in Indonesian online media, the role of digital literacy, and how libraries can serve as institutional anchors for information verification. Findings suggest that fact-checking culture must be cultivated through collaborative efforts among media organizations, educational institutions, libraries, and the public. Libraries, in particular, hold a strategic role in promoting information literacy and empowering communities to critically evaluate information. The article concludes with recommendations for strengthening fact-checking ecosystems in Indonesia.

Keywords: fact-checking; misinformation; digital literacy; hoax; library

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap informasi global. Kemudahan akses internet dan proliferasi media sosial memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Hal ini membuka peluang demokratisasi informasi yang belum pernah ada sebelumnya, namun sekaligus memunculkan tantangan serius berupa penyebaran misinformasi, disinformasi, dan hoaks yang massif dan sulit dikendalikan.

Misinformasi merujuk pada informasi yang salah atau tidak akurat yang disebarakan tanpa niat menipu, sedangkan disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarakan untuk menyesatkan publik. Kedua fenomena ini berdampak nyata pada kohesi sosial, stabilitas politik, dan kesehatan psikologis masyarakat (Juliyanti dkk., 2025)¹. Dalam konteks Indonesia, penyebaran hoaks telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama menjelang dan selama perhelatan demokrasi seperti pemilihan umum, di mana manipulasi informasi berpotensi memengaruhi proses dan hasil demokrasi secara langsung.

Berbagai platform media sosial dan media daring menjadi saluran utama penyebaran konten yang tidak terverifikasi. Fenomena ini mendorong lahirnya jurnalisme cek fakta sebagai respons terhadap degradasi kualitas informasi. Di Indonesia, sejumlah platform dan rubrik cek fakta telah bermunculan, mulai dari Cek Fakta Liputan6.com, Suara.com, Tirto.id, hingga lembaga khusus seperti Jabar Saber Hoaks (Wibowo, 2020; Qodarotin & Rachmawati, 2023)².

Kehadiran lembaga-lembaga verifikasi tersebut saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan pembangunan budaya cek fakta di level masyarakat. Upaya melawan misinformasi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistematis, yang tidak hanya melibatkan jurnalis dan lembaga media, tetapi juga institusi pendidikan, perpustakaan, dan masyarakat luas. Perpustakaan sebagai institusi informasi memiliki posisi yang unik dan strategis dalam ekosistem informasi nasional untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya membangun budaya cek fakta di masyarakat sebagai strategi jangka panjang dalam menangkal misinformasi. Dengan mengkaji berbagai studi dan praktik cek fakta yang telah dilakukan di Indonesia, artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang lanskap verifikasi informasi, peran literasi digital, serta kontribusi potensial perpustakaan dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mensintesis pengetahuan yang telah ada dari berbagai sumber akademis terkait topik cek fakta, misinformasi, dan literasi digital. Kajian literatur dipandang sebagai metode yang tepat untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang telah banyak diteliti sebelumnya dari berbagai perspektif keilmuan.

¹ Putri Juliyanti Magfira Bailusi et al., "Penanggulangan Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Di Media Sosial," *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 3, no. 4 (2025): 1697–1709, <https://doi.org/10.60126/maras.v3i4.1384>.

² Nurkarimah Qodarotin R.S. and Farida Rachmawati, "Pemetaan Hoaks Keagamaan Di Media," *Mu'ashir: Jurnal Dakwah & Komunikasi Islam* 1, no. 2 (2023): 115.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi yang relevan menggunakan basis data akademis daring. Penelusuran difokuskan pada publikasi berbahasa Indonesia dan Inggris yang membahas praktik cek fakta, fenomena hoaks dan misinformasi di media sosial, peran literasi digital dalam masyarakat, serta kontribusi perpustakaan dan pustakawan dalam ekosistem informasi. Kriteria inklusi mencakup artikel yang telah melalui proses peer review dan diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan dengan perkembangan fenomena misinformasi digital di Indonesia.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan kesenjangan dalam literatur yang ada, kemudian mensintesisnya untuk membangun argumen yang komprehensif. Proses analisis mengikuti tahapan: (1) identifikasi dan seleksi sumber literatur, (2) ekstraksi data dan temuan kunci dari masing-masing sumber, (3) kategorisasi berdasarkan tema, dan (4) sintesis untuk menghasilkan narasi yang kohesif mengenai pentingnya budaya cek fakta sebagai respons terhadap misinformasi di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Misinformasi di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka ruang yang sangat luas bagi peredaran informasi, namun sekaligus menjadi jalan bebas hambatan bagi misinformasi. Media sosial, dengan algoritmanya yang cenderung memperkuat echo chamber, telah menjadi saluran utama penyebaran hoaks. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konten yang membangkitkan emosi terutama ketakutan dan kemarahan, memiliki tingkat penyebaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan konten faktual, sehingga informasi provokatif dan tidak akurat justru lebih cepat viral daripada informasi yang benar.

Kajian terhadap peta hoaks keagamaan di media Indonesia menunjukkan bahwa konten bernuansa SARA menjadi salah satu jenis hoaks yang paling banyak beredar dan paling berbahaya bagi persatuan bangsa. Qodarotin dan Rachmawati (2023) dalam studinya terhadap rubrik Cek Fakta Liputan6.com dan Suara.com menemukan bahwa hoaks keagamaan secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam kategori konten yang paling banyak diverifikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa misinformasi tidak hanya merupakan masalah informasi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan isu identitas, kepercayaan, dan solidaritas sosial yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Lebih jauh, Iswara (2023) dalam penelitiannya tentang hoaks yang dipublikasikan secara berulang mengidentifikasi pola menarik di mana konten yang sama atau serupa terus-menerus beredar dalam siklus waktu tertentu, terutama pada momen-momen krusial

seperti menjelang pemilu atau bencana alam³. Temuan ini menggarisbawahi bahwa tantangan misinformasi bukan sekadar fenomena sesaat, melainkan permasalahan struktural yang memerlukan respons sistematis dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan ekosistem informasi.

Dalam konteks yang lebih luas, Juliyanti dkk. (2025) mencatat bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial telah berkembang menjadi ancaman multidimensi yang merusak tatanan informasi dan berdampak pada kesehatan psikologis individu serta ketahanan sosial komunitas. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kemampuan literasi digital sebagian besar pengguna internet Indonesia, yang seringkali tidak dibekali dengan keterampilan kritis untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya.

Praktik Jurnalisme Cek Fakta di Indonesia

Sebagai respons terhadap merebaknya misinformasi, jurnalisme cek fakta berkembang pesat di Indonesia. Jurnalisme cek fakta (fact-checking journalism) merupakan pendekatan jurnalistik yang secara khusus berfokus pada verifikasi klaim-klaim faktual yang beredar di ruang publik. Pendekatan ini mengedepankan metode yang sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses verifikasi informasi, sehingga berbeda dari jurnalisme konvensional yang umumnya berfokus pada pelaporan peristiwa baru.

Hanifah dan Monggilo (2022) dalam penelitian mereka tentang praktik cek fakta dan check-worthiness di Tempo.co selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa jurnalisme cek fakta memainkan peran vital dalam menyaring informasi yang bernilai untuk diverifikasi⁴. Dalam konteks pandemi, di mana infodemi (epidemic of misinformation) berjalan beriringan dengan pandemi sesungguhnya, kemampuan menentukan klaim mana yang layak dicek menjadi keterampilan jurnalistik yang sangat krusial. Tempo.co menerapkan kriteria check-worthiness yang terstruktur dengan mempertimbangkan dampak potensial, potensi penyebaran, serta kepentingan publik dari setiap klaim yang akan diverifikasi.

Andini, Dita, dan Putri (2025) dalam kajian mereka tentang praktik fact-checking journalism pada pemberitaan hoaks terkait tokoh politik di Tirto.id menemukan bahwa media ini menggunakan pendekatan framing yang sangat terstruktur dalam menyajikan hasil verifikasi⁵. Tirto.id menerapkan mekanisme pembingkai yang tidak hanya menyajikan kebenaran faktual, tetapi juga memberikan konteks historis dan sosial yang membantu

³ Agus Ari Iswara, "Analisis Hoaks Yang Dipublikasikan Berulang," *Jurnal Pekommas* 8, no. 1 (2023): 87–94, <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.4950>.

⁴ Annisa Nurul Hanifah and Zainuddin Muda Z Monggilo, "Fact-Checking and Check-Worthiness Determination on Tempo . Co during Covid-19 Pandemic" 7, no. 1 (2022): 32–43.

⁵ Risma Mutia Andini, Rohmadtika Dita, and Eliza Putri, "Fact Checking Journalism Pada Berita Hoaks Terkait Anies Baswedan Di Media Online," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 9, no. 4 (2025): 2123–33, <https://doi.org/10.31604/jim.v9i4.2025.2123-2133>.

pembaca memahami akar permasalahan informasi yang disebarkan. Pendekatan kontekstualisasi ini penting untuk memastikan bahwa verifikasi fakta tidak sekadar membantah klaim palsu, tetapi juga membangun pemahaman publik yang lebih mendalam.

Di tingkat institusional pemerintah daerah, Rojas (2025) mendokumentasikan prosedur cek fakta yang diterapkan oleh Jabar Saber Hoaks⁶. Lembaga ini menerapkan prosedur terstandarisasi mulai dari penerimaan laporan masyarakat, proses verifikasi multi-sumber, hingga diseminasi hasil pemeriksaan fakta kepada publik. Model ini menarik karena mengintegrasikan partisipasi publik dalam proses verifikasi, sehingga menciptakan ekosistem cek fakta yang lebih demokratis dan inklusif. Partisipasi masyarakat dalam proses pelaporan tidak hanya meningkatkan volume konten yang dapat diverifikasi, tetapi juga membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap upaya melawan misinformasi.

Hapsari (2020) menganalisis inovasi jurnalis daring dalam kolaborasi tim cek fakta selama pemberitaan Pilpres 2019⁷. Penelitian ini menyoroti bagaimana tekanan tinggi dari gelombang informasi selama periode pemilihan umum mendorong lahirnya model-model kolaborasi baru antara berbagai organisasi media. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan jangkauan verifikasi, tetapi juga memperkuat kredibilitas hasil cek fakta melalui validasi silang antar-lembaga. Model kolaborasi lintas-media ini menjadi preseden berharga yang dapat diterapkan dalam situasi krisis informasi lainnya di masa mendatang.

Secara keseluruhan, perkembangan jurnalisme cek fakta di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Namun, kapasitas lembaga-lembaga cek fakta yang ada masih belum sebanding dengan volume misinformasi yang terus meningkat. Dibutuhkan dukungan yang lebih sistematis—baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, maupun pembiayaan—untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kapasitas ekosistem cek fakta Indonesia ke depannya.

Literasi Digital sebagai Fondasi Budaya Cek Fakta

Jurnalisme cek fakta yang kuat saja tidak cukup untuk membendung arus misinformasi. Diperlukan masyarakat yang melek informasi dan memiliki kemampuan untuk secara mandiri melakukan verifikasi dasar terhadap informasi yang mereka terima. Di sinilah literasi digital memegang peran yang tidak tergantikan sebagai fondasi dari budaya cek fakta yang berkelanjutan dan efektif.

Program-program pelatihan verifikasi hoaks secara langsung kepada masyarakat, seperti yang didokumentasikan oleh Hastuti dkk. (2022) dalam program pelatihan di Desa Bahari Dua, Kabupaten Buton Selatan, menunjukkan bahwa kapasitas verifikasi masyarakat

⁶ J Eduardo Rojas, Guido Cortez Calla, and Teresa Sanjinés Lora, "Era Digital Era Digital," *Repositorio Institucional Del Tecnológico de Monterrey RITEC* 454, no. Ecep 2019 (2017): 5858–68.

⁷ Dian Tri Hapsari, "Inovasi Jurnalis Daring Dalam Kolaborasi Tim Cek Fakta Selama Pemberitaan Pilpres 2019," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2020): 51–63, <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.1.51-63>.

dapat ditingkatkan secara signifikan melalui intervensi edukatif yang tepat sasaran⁸. Program ini membekali pemuda desa dengan keterampilan menggunakan berbagai platform cek fakta yang tersedia, mulai dari Google Reverse Image Search hingga berbagai situs fact-checker lokal dan internasional. Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal literasi digital.

Pendekatan inovatif dalam pendidikan literasi digital juga telah dikembangkan melalui metode gamifikasi. Apul dan Purnama (2024) melaporkan keberhasilan workshop literasi digital berbasis Komunikasi Antar Pribadi (KAP) dengan metode boardgame bagi mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya⁹. Penggunaan permainan dalam pembelajaran terbukti meningkatkan engagement dan retensi pemahaman, menjadikan proses belajar literasi digital lebih menyenangkan dan efektif terutama bagi generasi muda. Pendekatan gamifikasi ini menawarkan alternatif yang menjanjikan untuk mengatasi kejenuhan terhadap metode pelatihan konvensional yang cenderung bersifat satu arah dan kurang interaktif.

Saffanah dan Suryana (2025) dalam kajiannya mengenai strategi konten pemasaran Instagram rubrik Cek Fakta menunjukkan dimensi lain dari penyebaran budaya cek fakta, yakni melalui platform media sosial itu sendiri¹⁰. Temuan ini membuka wawasan bahwa media sosial bukan semata-mata menjadi masalah dalam ekosistem informasi, melainkan juga dapat menjadi solusi yang efektif apabila dimanfaatkan secara strategis untuk mendistribusikan konten verifikasi kepada khalayak yang lebih luas. Strategi konten yang tepat—termasuk pemilihan format, waktu posting, dan pendekatan naratif—sangat menentukan seberapa jauh konten cek fakta dapat menjangkau dan memengaruhi audiens.

Literasi digital yang komprehensif tidak hanya mencakup keterampilan teknis verifikasi informasi, tetapi juga meliputi pemahaman tentang cara kerja algoritma media sosial, kemampuan berpikir kritis terhadap sumber informasi, dan kesadaran akan bias kognitif yang memengaruhi penerimaan informasi. Pendidikan literasi digital yang holistik perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum formal dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta dikembangkan dalam program-program pendidikan non-formal yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

⁸ Hastuti Hastuti et al., "Pelatihan Verifikasi Hoax Melalui Media Cek Fakta Pada Anak Muda Desa Bahari Dua Kabupaten Buton Selatan," *SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 69, <https://doi.org/10.35329/sipissangngi.v2i1.2810>.

⁹ Merlina Maria Barbara Apul and Finsensius Yuli Purnama, "Workshop Literasi Digital Berbasis KAP Dengan Metode Boardgame Bagi Mahasiswa UKWMS, Kampus Madiun," *Journal of Indonesian Society Empowerment* 2, no. 1 (2024): 9–25, <https://doi.org/10.61105/jise.v2i1.73>.

¹⁰ Moura Saffanah and Asep Suryana, "Content Marketing Strategy in Building Engagement of Instagram Followers of Cek Fakta," *At-Tawasul* 4, no. 2 (2025): 20–30, <https://doi.org/10.51192/ja.v4i2.2104>.

Peran Strategis Perpustakaan dalam Menangkal Misinformasi

Perpustakaan, sebagai institusi yang secara tradisional bertugas mengelola dan menyediakan akses terhadap informasi yang terpercaya, memiliki posisi strategis yang unik dalam upaya menangkal misinformasi. Di era post-truth ini, peran pustakawan berevolusi secara signifikan dari sekadar pengelola koleksi menjadi navigator informasi dan educator literasi informasi yang handal bagi masyarakat.

Sebagai kurator informasi yang terlatih secara profesional, pustakawan memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan untuk membantu pengguna membedakan antara sumber informasi yang dapat dipercaya dan yang tidak. Kompetensi ini meliputi kemampuan evaluasi sumber berdasarkan kriteria otoritas, akurasi, objektivitas, kemutakhiran, dan cakupan; pemahaman mendalam tentang metodologi penelitian; serta pengetahuan tentang berbagai tipologi bias informasi yang dapat memengaruhi kualitas suatu sumber. Dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat literasi informasi komunitas, masyarakat dapat memperoleh panduan profesional dalam menavigasi lanskap informasi yang semakin kompleks.

Perpustakaan juga dapat berperan aktif dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program-program pendidikan literasi informasi yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Program semacam ini tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis verifikasi informasi, tetapi juga membangun habitus berpikir kritis yang menjadi fondasi dari budaya cek fakta yang berkelanjutan. Habitus ini merupakan disposisi yang tertanam secara mendalam dalam cara individu memandang dan merespons informasi, sehingga verifikasi menjadi refleks intelektual yang otomatis daripada sekadar keterampilan situasional.

Menempatkan perpustakaan sebagai pusat ekosistem informasi komunitas, menjadikan institusi sebagai garda terdepan dalam melawan penyebaran misinformasi di tingkat lokal. Perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan umum masing-masing memiliki segmen komunitas yang dapat dijangkau dan diberdayakan. Jaringan perpustakaan yang tersebar luas di seluruh Indonesia merupakan infrastruktur yang sangat berharga untuk mendistribusikan program literasi informasi secara merata, termasuk ke daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap media terpercaya.

Perpustakaan dapat berkolaborasi dengan media lokal, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun jaringan verifikasi informasi yang lebih kuat dan merata. Kolaborasi lintas-sektor ini sejalan dengan model yang telah terbukti efektif dalam konteks jurnalisme cek fakta, di mana kolaborasi antar-lembaga terbukti meningkatkan kapasitas dan kredibilitas proses verifikasi (Hapsari, 2020). Perpustakaan dapat memposisikan diri sebagai simpul koordinasi dalam jaringan kolaboratif ini,

memanfaatkan keahlian dan infrastruktur yang dimilikinya untuk memfasilitasi aliran informasi terverifikasi kepada masyarakat secara lebih efektif.

Inovasi layanan perpustakaan juga perlu dipertimbangkan untuk menjawab tantangan era digital. Pengembangan portal verifikasi informasi berbasis perpustakaan, pelatihan literasi informasi daring, serta integrasi layanan referensi dengan platform media sosial merupakan beberapa contoh inovasi yang dapat meningkatkan relevansi dan dampak perpustakaan dalam upaya menangkal misinformasi. Transformasi digital perpustakaan bukan sekadar modernisasi layanan, tetapi merupakan respons institusional yang dibutuhkan untuk tetap relevan dan efektif menghadapi tantangan ekosistem informasi abad ke-21.

SIMPULAN DAN SARAN

Misinformasi merupakan tantangan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak atau satu pendekatan saja. Membangun budaya cek fakta merupakan upaya jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi media, institusi pendidikan, pemerintah, hingga masyarakat luas. Kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki ekosistem jurnalisme cek fakta yang cukup berkembang dengan berbagai lembaga dan platform yang secara aktif melakukan verifikasi informasi.

Upaya tersebut perlu diperkuat dengan pendekatan sistematis yang menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, terutama mereka yang berada di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap media terpercaya. Literasi digital yang holistic mencakup keterampilan teknis verifikasi, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran akan cara kerja ekosistem informasi digital, harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional dan program pemberdayaan masyarakat.

Perpustakaan, sebagai institusi informasi yang tersebar luas dan memiliki mandat untuk melayani publik tanpa diskriminasi, memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam ekosistem cek fakta nasional. Pengembangan program literasi informasi yang inovatif dan adaptif, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, merupakan langkah konkret yang dapat segera diambil oleh perpustakaan untuk berkontribusi dalam upaya menangkal misinformasi di era digital.

Ke depan, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur efektivitas berbagai intervensi literasi digital yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi model-model terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia yang beragam. Pengembangan kurikulum literasi informasi yang berjenjang dan terstandarisasi dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi perlu menjadi prioritas kebijakan nasional, disertai kerangka kolaborasi formal antara

perpustakaan, lembaga cek fakta, dan institusi pendidikan untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan tahan terhadap misinformasi.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Malang dan Universitas Pendidikan Ganesha atas dukungan akademis yang diberikan dalam proses penulisan artikel ini. Terima kasih pula kepada para reviewer atas masukan berharga untuk penyempurnaan naskah.

Daftar Pustaka

- Andini, Risma Mutia, Rohmaditika Dita, and Eliza Putri. "Fact Checking Journalism Pada Berita Hoaks Terkait Anies Baswedan Di Media Online." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 9, no. 4 (2025): 2123–33. <https://doi.org/10.31604/jim.v9i4.2025.2123-2133>.
- Apul, Merlina Maria Barbara, and Finsensius Yuli Purnama. "Workshop Literasi Digital Berbasis KAP Dengan Metode Boardgame Bagi Mahasiswa UKWMS, Kampus Madiun." *Journal of Indonesian Society Empowerment* 2, no. 1 (2024): 9–25. <https://doi.org/10.61105/jise.v2i1.73>.
- Bailusi, Putri Juliyanti Magfira, Nabila Syaunqiyah, Anindita Dwi Saputri David, Madinatul Munawwarah, Siti Nahdah Fadhillah Anggowa, Rahmatia Renyaan, Keisya Rafeyfa Asyla, Andini Khaerani Rahim, Salza Risky Wahyudi, and Firmansyah Koesyono Efendi. "Penanggulangan Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Di Media Sosial." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 3, no. 4 (2025): 1697–1709. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i4.1384>.
- Hanifah, Annisa Nurul, and Zainuddin Muda Z Monggilo. "Fact-Checking and Check-Worthiness Determination on Tempo . Co during Covid-19 Pandemic" 7, no. 1 (2022): 32–43.
- Hapsari, Dian Tri. "Inovasi Jurnalis Daring Dalam Kolaborasi Tim Cek Fakta Selama Pemberitaan Pilpres 2019." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2020): 51–63. <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.1.51-63>.
- Hastuti, Hastuti, Harry Fajar Maulana, Muhammad Rizal Ardiansyah Putra, Muh. Hidayatullah, Juliana Juliana, Puput Burhan, Aulia Saputri, and Muhammad Qolby Zulfaqar Eshaya. "Pelatihan Verifikasi Hoax Melalui Media Cek Fakta Pada Anak Muda Desa Bahari Dua Kabupaten Buton Selatan." *SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 69. <https://doi.org/10.35329/sipissangngi.v2i1.2810>.
- Iswara, Agus Ari. "Analisis Hoaks Yang Dipublikasikan Berulang." *Jurnal Pekommas* 8, no. 1 (2023): 87–94. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.4950>.
- Qodarotin R.S., Nurkarimah, and Farida Rachmawati. "Pemetaan Hoaks Keagamaan Di Media." *Mu'ashir: Jurnal Dakwah & Komunikasi Islam* 1, no. 2 (2023): 115.
- Rojas, J Eduardo, Guido Cortez Calla, and Teresa Sanjinés Lora. "Era Digital Era Digital." *Repositorio Institucional Del Tecnológico de Monterrey RITEC* 454, no. Ecep 2019 (2017): 5858–68.

Saffanah, Moura, and Asep Suryana. "Content Marketing Strategy in Building Engagement of Instagram Followers of Cek Fakta." *At-Tawasul* 4, no. 2 (2025): 20–30. <https://doi.org/10.51192/ja.v4i2.2104>.